



Akses Dermaga Gunaksa Dipending

"Padahal kegiatan tersebut sudah dianggarkan Pusat pada APBN 2015 Rp 40 miliar.

SEMARAPURA, NusaBali
Kementerian Perhubungan RI mempending bantuan akses jalan menuju Dermaga Gunaksa, Klungkung. Sebab ada kekhawatiran dalam perjalanan proyek bernilai puluhan miliar tersebut

mentok karena terjangan air dari Tukad Unda, ketika musim hujan berlangsung.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Kamis (22/10), tidak menampilkan realita tersebut. Setelah bertemu langsung dengan Dirjen Perhubungan Darat, Suwirta mendapatkan jawaban bahwa pemerintah pusat belum berani mencairkan dana puluhan miliar tersebut pada tahun ini. "Padahal kegiatan tersebut sudah dianggarkan oleh kementerian, pada APBN 2015 mencapai Rp 40 miliar. Dimana rencananya, uang

tersebut untuk membangun akses jalan dermaga sepanjang sekitar 1,7 km," ujarnya.

Suwirta menegaskan, penundaan hal itu bukan karena proyek dermaga yang sedang berkaskus. Namun, lantaran normalisasi Tukad Unda belum tuntas. Pihak kementerian khawatir, kalau proyek akses jalan dermaga dibangun, maka dirusak akibat aliran Tukad Unda yang belum dinormalisasi. Sebab, masih ada kubungan-kubungan Tukad Unda. "Apalagi ketika musim hujan, air sungai tersebut

sangat deras, sehingga bisa menjadi ancaman," sebutnya.

Kata dia, Dirjen Perhubungan Darat sudah sempat menetapkan pemenang tender, namun karena persoalan tersebut, proyek itu tidak jadi tahun 2015 ini.

Sebelum dilakukan normalisasi yang dibiayai Balai Wilayah Sungai Bali Penida, kata Suwirta, terlebih dahulu pihaknya harus melakukan pendataan pemilik lahan di wilayah eks galian C tersebut, di sekitaran Tukad Unda. Setelah semua pemilik lahan didata, barulah pemerintah bisa melakukan pemetaan untuk

normalisasi Tukad Unda. "Untuk pendataannya saja, paling cepat bisa kelar pada awal tahun 2016 nanti," sebutnya.

Pasalnya, dari ribuan pemilik lahan di eks galian C, baru sekitar 300 pemilik lahan, yang sudah mengambil formulir sebagai proses awal melakukan pendataan. Dari jumlah yang mengambil formulir itu, juga belum ada yang mengembalikan, karena harus diisi lengkap. "Mudah-mudahan akses jalan tersebut bisa te-realiasi pada tahun depan," harapnya. **cr53**

Edisi : Jum'at, 23 Oktober 2015

Hal : 6



Disdikpora Bantah Lamban Tangani

★ Kerusakan Fasilitas di SDN 1 Kerobokan



• DOK NUSABALI
Ruang Laboratorium dan UKS SDN 1 Kerobokan, Kuta Utara yang rusak.

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung tidak mau disalahkan terkait kerusakan ruang laboratorium dan UKS milik SDN 1 Kerobokan, Kuta Utara, yang ditemukan Dewan Badung, Rabu (21/10).

"Sebenarnya kami sudah mengetahui kerusakan itu (salah satu ruangan fasilitas di SDN 1 Kerobokan, red). Tapi tidak mungkin saat proposal diajukan, hari itu juga langsung dapat bantuan, kan ada prosesnya," ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung I Ketut Widia Astika, Kamis (22/10) kemarin.

Dari penjelasan Astika terungkap bahwa kerusakan plafon dan atap bangunan ruangan laboratorium dan UKS di SDN 1 Kerobokan sudah terjadi sejak sekitar setahun lalu. Pihak sekolah pun dinilai sudah tepat dengan segera melakukan pemberitahuan sekaligus permohonan perbaikan. Cuma menurutnya tidak mungkin begitu proposal

diajukan lantas langsung mendapatkan bantuan.

Mantan kepala SMKN 1 Kuta Selatan itu lebih lanjut mengatakan, pihaknya dari proposal yang masuk langsung turun melakukan peninjauan untuk menentukan skala prioritas. Tidak saja dari SDN 1 Kerobokan, tapi seluruh proposal yang masuk dicek langsung ke sekolah bersangkutan. "Itu rusaknya akhir tahun 2014 sehingga baru bisa dianggarkan di APBD Perubahan 2015. Proses sudah dimulai, tim sudah ke sekolah awal Oktober, hanya saja saat itu kepala sekolah tidak ada di sekolah," beber Astika. Mengenai anggaran yang dipersiapkan untuk perbaikan diperkirakan mencapai Rp 150 juta. "Kalau tidak salah Rp 150 juta. Saya lupa pastinya," imbuhnya.

"Hari ini (kemarin) kami panggil pihak sekolah untuk memberikan penjelasan bila proses perbaikan sedang diupayakan," tandas Astika sembari menyebut untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) akan diusulkan pada APBD 2016.

Pada bagian lain Kabid Sarana dan Prasarana Disdikpora Badung Ida Bagus Ananta, menyebutkan tahun 2015 Disdikpora menggarap sedikitnya 71 kegiatan dalam rangka membantu perbaikan dan pembangunan RKB. Anggaran yang disiapkan untuk perbaikan dan pembangunan RKB sekitar Rp 93 miliar.

Sebelumnya diberitakan, ruangan laboratorium dan UKS di SDN 1 Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, rusak parah termakan usia. Mirisnya walaupun pihak sekolah telah mengajukan permohonan perbaikan namun belum ada respon. Padahal dulunya sekolah ini menamatkan Sekda Badung Kompyang R. Swandika. as

Edisi : Jumat, 23 Oktober 2015

Hal : 2



Ingin Mobil Dinas Baru, Dewan Rela Bansos Dipangkas

SINGARAJA, NusaBali

Keinginan mendapat fasilitas mobil dinas, masing-masing anggota kini rela jatah batuan sosial (Bansos) mereka dipangkas. Namun, rencana itu masih tarik ulur karena beberapa anggota kurang setuju.

Informasi yang dihimpun di Gedung DPRD Buleleng, Kamis (22/10) menyebut, keinginan mendapat fasilitas mobil dinas bagi masing-masing anggota dewan tampaknya sulit dibendung. Mereka pun sudah merancang pola penganggaran pembelian mobil tersebut dengan memangkas jatah bansosnya. Pola itu ditempuh, agar tidak mengganggu komposisi APBD antara belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Data dihimpun, untuk tahun anggaran 2016 nanti, masing-masing anggota mendapat jatah bansos sebesar Rp 500 juta. Jatah tersebut hampir sama dengan jatah bansos di tahun 2015. Semula anggota DPRD menghendaki agar Pemkab menaikkan jatah bansosnya dari Rp 500 juta menjadi Rp 750 juta di tahun 2016. Selain minta kenaikan jatah bansos, anggota dewan juga minta fasilitas mobil dinas. Namun, Pemkab Buleleng tidak bisa penuhi keinginan tersebut karena kebutuhan anggaran di tahun 2016 cukup tinggi, salah satunya kepentingan Pilkada 2017 yang diperkirakan mencapai hampir Rp 70 miliar.

Dari pembahasan awal, akhirnya disepakati jatah bansos bagi masing-masing anggota hanya disetujui sebesar Rp 500 juta. Demikian juga dengan pembelian mobil dinas, Pemkab angkat tangan alias tidak bisa penuhi keinginan tersebut. Kendati tidak bisa dipenuhi, namun anggota dewan punya cara lain agar bisa mendapat fasilitas mobil dinas tersebut. Kabarinya, mereka rela jatah bansosnya dipangkas setengahnya untuk pengadaan mobil dinas. Sedangkan setengahnya lagi tetap dipakai membantu masyarakat yang mengajukan proposal. "Kalau disetujui, jenis mobilnya itu disesuaikan dengan jumlah uang hasil pengurangan jatah bansos itu," ucap sumber terpercaya di lingkungan Gedung DPRD Buleleng.

Masih kata sumber, rencana pemangkasan jatah bansos itu masih tarik ulur. Masalahnya tidak semua anggota dewan sepakat dengan rencana tersebut. Bagi anggota dewan yang tidak setuju, tidak akan mengambil mobil dinas jika pengadaan mobil dinas itu melalui mekanisme pemangkasan jatah bansosnya. "Tapi belum ada titik temu, karena ada yang tidak setuju. Kalau itu dipaksakan, yang tidak setuju itu tidak akan mengambil jatah mobil dinasnya," ujar sumber mewanti-wanti namanya tidak ditulis.

Sementara Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna yang dikonfirmasi usai sidang paripurna DPRD Buleleng, kemarin tidak menampik kondisi tersebut. Dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan sikapnya. "Memang ada keinginan pengadaan mobil dinas itu, tapi kalau masalah ada setuju atau tidak, saya selaku pimpinan menyerahkan kembali pada anggota. Kalau bisa lewat fraksinya agar satu suara, setuju atau tidak setuju. Ini kan masih wacana belum ada kepastian," ujarnya. **k19**

Edisi : Jumat, 23 Oktober 2015

Hal : 4



Pro Kontra Proyek Dermaga Curah Pelindo

Bupati Tunggu Sinkronisasi

RTRW dengan RIP

Meski jadi kewenangan otoritas pusat, Pemkab Buleleng juga merasa berhak mengetahui rencana pembangunan pelabuhan ke depan, karena menyangkut aspek kewilayahan

SINGARAJA, NusaBali

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana akhirnya angkat bicara masalah kewenangan dalam menyikapi pembangunan

dermaga curah cair oleh Pelindo III, di Pelabuhan Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak. Bupati menyebut, Pemkab Buleleng berhak mengetahui rencana pembangunan tersebut, karena menyangkut aspek kewilayahan.

Masalahnya, Pemkab Buleleng punya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dimana wilayah Celukan Bawang diatur di dalamnya sebagai kawasan industri. "Jangan semata-mata berbicara otoritas. Apapun kegiatan itu baik dari pusat, provinsi dan kabupaten, tentu harus memperhatikan aspek ekonomi dan sosialnya. Dan kami berhak mengetahui rencana tersebut. Tapi selama ini kami tidak pernah tahu rencana itu," ungkap Bupati, usai menyampaikan Nota Pengantar Keunangan APBD tahun 2016, Kamis (22/10)

pagi di Gedung DPRD Buleleng.

Dijelaskan, pihak pengelola pelabuhan setidaknya memiliki rencana induk pelabuhan (RIP) dalam pengembangan pelabuhan kedepannya. Nah, didalam penyusunan RIP itu, ada koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten. Koordinasi itu penting untuk menyesuaikan dengan kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten, sehingga tidak terjadi benturan dalam implementasinya.

"Saya rasa ini (RIP), belum pernah dikoordinasikan, karena sampai saat ini saya belum mengetahui RIP itu. Dan kita berhak mengetahui perkembangan dari pembangunan itu. Kalau hanya berbicara masalah otoritas, buat apa kita susun Perda RTRW," tandas Bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar ini.

Menurut orang nomor satu di Buleleng ini, dirinya menyadari dari segi regulasi, perizinan pembangunan dermaga curah cair tersebut diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenuh) RI melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Namun demikian, sejalan dengan nafas otonomi daerah, setiap investasi baik swasta dan pemerintah harusnya ada koordinasi dan komunikasi dengan provinsi dan kabupaten.

"Kita tidak ada menghambat atau tidak mendukung program pusat dalam mengembangkan poros maritim, tetapi perlu diperhatikan jangan sampai investasi itu bertentangan dengan Perda RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten," katanya.

Dalam hal ini, Bupati Putu Agus menegaskan, pihaknya tetap membuka diri untuk menjalin komuni-

kasi terkait rencana pembangunan tersebut. Dirinya pun berharap, pihak pengelola pelabuhan celukan bawang bisa menyampaikan rencana pembangunan dermaga curah cair tersebut.

Terkait upaya Saatpol PP yang telah memberikan sanksi penghentian sementara pengerjaan proyek, Bupati mengaku belum memberikan petunjuk lebih lanjut. Setelah nanti ada penjelasan terkait dokumen RIP tersebut, Bupati baru akan memberikan perintah kepada Satpol PP untuk mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Jangan dilanjutkan dulu dan ini mis komunikasi saja akan kita akan selesaikan dulu, dan setelah itu baru akan ada perintah dari kami kepada Pol-PP untuk mengambil tindakan lanjutan," katanya. **k19**

Edisi : Jumat, 23 Oktober 2015

Hal : 4



Rp 3,8 M untuk Seragam Baru Guru se-Badung

MANGUPURA, NusaBali

Kalangan guru mulai dari SD sampai SMA bisa tersenyum sumrigrah. Pasalnya, pemerintah daerah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan seragam baru bagi sekitar 5 ribu guru PNS dan non PNS. Meski demikian, pengadaan seragam baru ini baru terealisasi pada tahun 2016 mendatang.

Kabar baik ini kontan mendapat sambutan hangat dari para guru. Apalagi sudah

cukup lama para guru tak kebagian jatah seragam baru. Sekda Badung Kompyang R Swandika, Kamis (22/10) mengatakan, anggaran yang sudah dipersiapkan sekitar Rp 3,8 miliar. Anggaran tersebut berasal dari dana Rp 37 miliar yang disebut-sebut sebagai dana yang sebelumnya diduga 'siluman' oleh kalangan dewan.

Menurut pejabat asal Kerobokan itu, pengadaan seragam baru sesuai dengan

kebutuhan. Yang dipersiapkan adalah khusus seragam endek. "Guru sebagai faktor penting dalam dunia pendidikan. Kalau seragamnya bagus pasti akan mempengaruhi performa saat mengajar," kata Swandika.

Lebih lanjut dikatakan, cukup lama guru di Badung tak mendapatkan jatah seragam baru. Sehingga tidak sedikit guru seragamnya sudah banyak kusam. Sehingga melihat kebutuhan itu, maka

pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk memberikan baju seragam bagi para guru.

"Anggaran sudah disiapkan dan pengadaannya tahun depan," imbuh Swandika. Kabag Humas dan Protokol Setda Badung AA Gede Raka Yuda, juga membenarkan rencana pengadaan seragam tersebut. Ia menjelaskan, pengadaan seragam terakhir dilakukan pada Maret 2014. "Baju yang dulu sudah kusam. Sehingga

diganti dengan seragam baru," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung I Ketut Widia Astika, mengatakan pengadaan seragam baru sudah direncanakan sebelumnya. Karena menurut Astika sudah lama guru tak mendapat seragam baru. "Iya betul akan ada pembelian seragam baru untuk para guru. Tapi datanya saya lupa," aku pejabat asal Kerobokan, itu. **as**

Edisi : Jumat, 23 Oktober 2015

Hal : 2